

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN PERTANIAN



DEPARTEMEN PERTANIAN 2004



Alapudin

Pamela Fadhilah 2004

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN PERTANIAN



DEPARTEMEN PERTANIAN 2004



KATA PENGANTAR

Sebagian besar pekerja Indonesia mengandalkan lapangan usaha pertanian. Lapangan usaha sektor pertanian selama ini terbukti merupakan lapangan usaha andalan dalam menyerap tenaga kerja dan masih dituntut untuk terus berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja untuk sebagian besar masyarakat.

Tenaga kerja pertanian dalam fungsinya sebagai input produksi dapat bersubstitusi dan bersinergi dengan alat mesin pertanian. Namun disisi lain, dalam fungsinya sebagai subyek pembangunan tenaga kerja pertanian memerlukan keahlian dalam pengelolaannya. Lapangan usaha di sektor pertanian sangat luas karena terkait dengan ragam komoditas yang diusahakan dan sub sistem usahatani yang dikelola. Berangkat dari kedua fungsi tersebut maka selain jumlah tenaga kerja menurut sub sektor, aspek lain yang dipandang perlu untuk diperhatikan dalam upaya pengembangan tenaga kerja pertanian adalah struktur tenaga kerja menurut umur dan pendidikan, status usaha, produktivitas berdasarkan curahan waktu dan pendapatan per kapita, serta analisis kebutuhan tenaga kerja untuk setiap sub sektor.

Buku "*Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan Pertanian*" memberikan informasi mengenai keragaan ketenagakerjaan sektor pertanian dalam sepuluh tahun terakhir serta implikasinya terhadap kebijakan umum dan strategi yang harus ditempuh guna pengembangan program ketenagakerjaan pertanian ke depan.

Buku ini diharapkan menjadi rujukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam perencanaan tenaga kerja sektor pertanian. Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan bagi penyusunan buku ini kami ucapkan terima kasih. Untuk penyempurnaan isi buku ini dimasa mendatang, saran perbaikan dan dukungan semua pihak sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2004

Bagian Perencanaan
Pembangunan Pertanian



DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Ruang Lingkup Bahasan.....	2
	C. Pengertian Istilah.....	5
II.	KERAGAAN KETENAGAKERJAAN PERTANIAN	7
	A. Jumlah Tenaga Kerja Pertanian.....	7
	B. Struktur Tenaga Kerja Pertanian	9
	C. Status Usaha Pertanian.....	11
	D. Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian.....	13
	E. Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja Pertanian	15
III.	ANALISIS STRATEGIS KETENAGAKERJAAN PERTANIAN.....	18
	A. Kekuatan	18
	B. Kelemahan	19
	C. Peluang	25
	D. Kendala dan Tantangan	28
IV.	KEBIJAKAN UMUM DAN STRATEGI KETENAGAKERJAAN PERTANIAN	37
	A. Kebijakan Umum	37
	B. Strategi.....	38
	DAFTAR PUSTAKA.....	45



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian dituntut untuk terus berperan aktif dalam pembangunan nasional melalui pembentukan PDB, penyedia pangan dan penyedia bahan baku industri, sumber devisa, sumber pendapatan dan lapangan kerja sebagian besar masyarakat.

Transformasi struktural pada pembangunan masa lalu, membuat laju pertumbuhan sektor di luar pertanian lebih tinggi dibanding sektor pertanian, yang mengakibatkan peran sektor pertanian dalam PDB terus menurun. Namun penurunan peran pertanian dalam PDB tersebut tidak diimbangi oleh penurunan beban secara proporsional dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga produktivitas pertanian semakin tertinggal dibanding sektor lainnya. Selama ini sektor pertanian dikondisikan sebagai penampung bagi tenaga kerja, terutama pekerja yang belum atau tidak dapat bekerja di sektor lain. Kondisi ini terjadi pada saat ekonomi mengalami krisis dimana banyak tenaga pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja dari sektor lain. Pada kondisi ini, sektor pertanian berperan sebagai penampung tenaga pengangguran tersebut meskipun tenaga kerja tersebut tidak sepenuhnya ingin menggeluti sektor pertanian.

Rendahnya produktivitas pertanian juga berkaitan dengan kecilnya asset yang dikelola petani, keterbatasan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, baik sumberdaya lahan, teknologi, modal dan pasar. Keberadaan sumberdaya alam pertanian juga bersifat terbatas dan semakin menurun akibat konversi lahan pertanian ke non-pertanian serta mengalami degradasi. Disisi lain angkatan kerja semakin meningkat sejalan dengan pertambahan

penduduk, sehingga tekanan terhadap sumberdaya pertanian terutama lahan dan air semakin besar. Skala usaha semakin kecil sehingga tingkat pemanfaatan tenaga kerja pertanian relatif rendah (*underemployed*). Apabila kondisi ini dibiarkan terus menerus, maka sektor pertanian akan semakin gurem dan akan ditinggalkan oleh tenaga potensial karena semakin tidak menarik sebagai suatu bidang usaha ekonomi.

Untuk menjawab masalah tersebut diperlukan reorientasi kebijakan dan program pembangunan nasional dan sektor pertanian yang lebih menitikberatkan kepada upaya peningkatan lapangan kerja dan produktivitas. Hal ini membutuhkan kebijakan yang holistik tidak saja di kebijakan karena terkait erat dengan kebijakan diluar pertanian.

B. Ruang Lingkup Bahasan

Kebijakan Umum dan strategi pengembangan ketenagakerjaan sektor pertanian disusun berdasarkan kerangka pemikiran (*conceptual framework*) sebagai berikut:

1. Kondisi tenaga kerja pertanian dipandang sebagai hasil dari kebijakan masa lalu serta pengaruh berbagai faktor internal dan eksternal pada saat itu. Bahasan tentang kondisi tenaga kerja pertanian ditinjau dari beberapa aspek, yaitu perkembangan jumlah tenaga kerja menurut sub sektor, struktur tenaga kerja pertanian menurut kelompok umur dan pendidikan, status usaha, produktivitas ditinjau dari curahan waktu kerja dan pendapatan per kapita, serta analisis kebutuhan tenaga kerja pertanian. Pemahaman terhadap data kondisi tenaga kerja pertanian

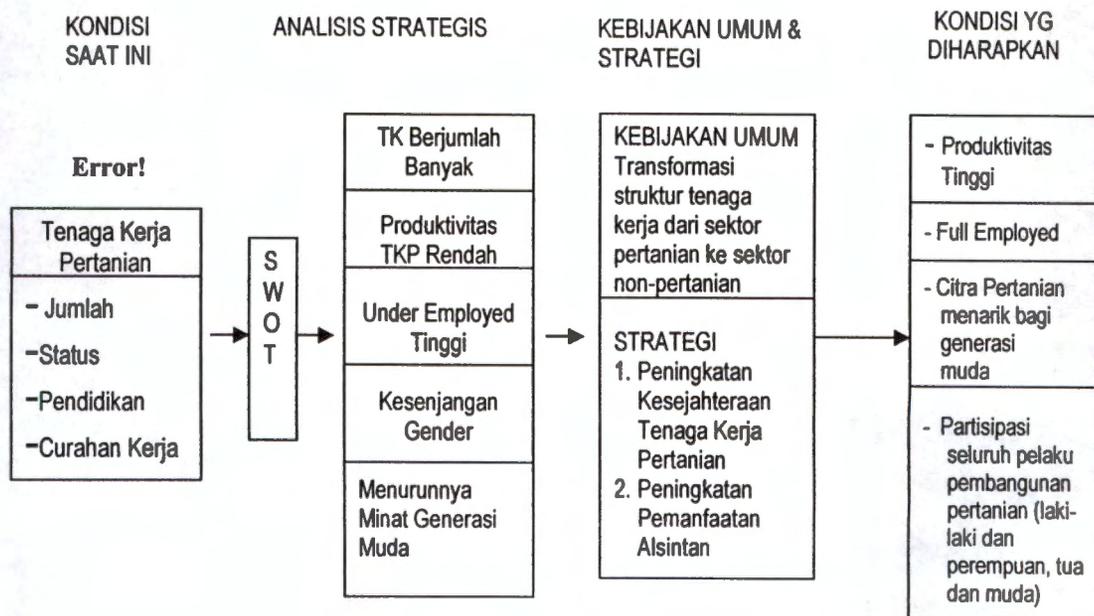


diharapkan mampu memperjelas deskripsi dan ruang lingkup pengertian tenaga kerja pertanian itu sendiri.

2. Kondisi ketenagakerjaan selanjutnya dianalisis dengan fokus pada aspek kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan dan kendala yang ada, yang sekaligus merupakan tahapan analisis terhadap isu-isu strategis ketenagakerjaan sektor pertanian. Isu strategis yang merupakan fokus analisis adalah besarnya jumlah tenaga kerja, rendahnya produktivitas tenaga kerja pertanian, tingginya tingkat pengangguran tak kentara (*under employed*), adanya kesenjangan akses dan kontrol terhadap sumberdaya pertanian serta tingkat partisipasi dan perolehan manfaat pembangunan antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan, serta regenerasi yang tidak berjalan dengan baik, akibat rendahnya minat generasi muda yang potensial untuk menjadikan pertanian (*on farm*) sebagai mata pencaharian utama
3. Kebijakan dan strategi yang dapat ditempuh untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan. Kebijakan, strategi dan program yang disusun diharapkan mampu mengurangi dampak negatif isu-isu strategis tersebut, bahkan dalam jangka panjang diharapkan mampu mengembalikan kondisi ketenagakerjaan yang ada menjadi memiliki produktivitas yang tinggi, tingkat curahan waktu kerja yang tinggi (*full time employment*), menarik minat tenaga kerja muda potensial, menjadikan gender sebagai arus utama kebijakan sehingga mampu membuka akses serta meningkatkan partisipasi tenaga kerja pertanian yang selama ini belum sepenuhnya menerima manfaat dari program-program pembangunan seperti tenaga kerja perempuan, kelompok lanjut usia, dan pemuda.



Secara skematis kerangka pemikiran perumusan kebijakan, strategi dan penyusunan program pengembangan ketenagakerjaan sektor pertanian digambarkan sebagai berikut:



C. Pengertian Istilah

1. Tenaga kerja pertanian adalah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja di sektor pertanian paling sedikit 1 (satu) jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu. (*Catatan: Sebelum tahun 1998 yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas*).
2. Tenaga kerja penuh (*full employed*) adalah tenaga kerja yang bekerja minimal 35 jam dalam seminggu.
3. Tenaga kerja setengah menganggur (*underemployed*) adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.
4. Tenaga menganggur (*unemployed*) adalah tenaga kerja yang sementara tidak bekerja seminggu yang lalu pada saat pencacahan.
5. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah mereka yang meninggalkan sekolah (berhenti dalam kegiatan sekolah) setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada suatu tingkatan sekolah sampai akhir dengan mendapat ijazah.
6. Status pekerjaan utama adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan pada unit usahatani/kegiatannya. Ada lima katagori status pekerjaan yaitu:
 - a) berusaha sendiri, adalah mereka yang bekerja atas resiko sendiri tanpa bantuan orang lain;
 - b) berusaha dengan dibantu anggota rumahtangga/buruh tidak tetap adalah mereka yang dalam menjalankan usahataniya dibantu oleh anggota rumah tangga atau oleh buruh tidak tetap yang dibayar;



- c) berusaha dengan buruh tetap adalah mereka yang dalam menjalankan usahataniya mempekerjakan buruh tetap yang dibayar. Mereka sering diartikan sebagai majikan;
 - d) buruh/karyawan adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau lembaga/instansi baik pemerintah maupun swasta dengan menerima upah/gaji baik berupa uang atau natura/barang. Buruh tani, walaupun tidak bekerja pada majikan tertentu secara tetap digolongkan sebagai buruh.
 - e) pekerja keluarga adalah orang yang bekerja membantu usaha keluarga untuk memperoleh penghasilan/keuntungan dan dilakukan tanpa mendapat upah atau gaji.
7. Alat dan mesin pertanian (alsintan) adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan pertanian mulai dari budidaya pra panen hingga pasca panen.
8. Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) didefinisikan sebagai kelompok/perorangan yang mengusahakan pelayanan jasa alsintan, kelompok khusus usaha pelayanan jasa alsintan atau kelompok tani yang memiliki unit usaha pelayanan jasa alsintan atau perorangan yang mengelola usaha pelayanan jasa alsintan.



II. KERAGAAN KETENAGAKERJAAN PERTANIAN

Tenaga kerja pertanian dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai input produksi dan sebagai subyek pembangunan. Sebagai input produksi, tenaga kerja merupakan tenaga pelaksana usaha pertanian sebagaimana bagian dari input produksi lain. Sebagai input produksi kedudukan tenaga kerja dapat bersubstitusi dan bersinergi dengan alat mesin pertanian (Alsintan). Sebagai subyek pembangunan, tenaga kerja merupakan pengelola usaha yang memerlukan keahlian dalam pengelolaannya. Bahasan tenaga kerja pertanian berkaitan dengan jumlah, struktur, kualitas dan produktivitasnya.

A. Jumlah Tenaga Kerja Pertanian

Dalam satu dekade terakhir (1992 - 2003) jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) rata rata 36,11 juta orang per tahun atau 42,²⁹~~14~~ persen dari tenaga kerja nasional. Kondisi ini menunjukkan fakta bahwa sektor pertanian di Indonesia sampai saat ini masih merupakan penyerap tenaga kerja tertinggi dan merupakan gantungan nafkah utama dari sebagian besar penduduk Indonesia, terutama di pedesaan.

Sebelum krisis beban tenaga kerja pertanian mengalami penurunan. Kejadian krisis yang berakibat pada meningkatnya pengangguran telah meningkatkan kembali tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian, sehingga setelah krisis (1998) tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian kembali meningkat. Diantara sub sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi di sub sektor tanaman pangan (Tabel 1).



Jumlah tenaga kerja pertanian ini menjadi lebih besar bila juga memperhitungkan mereka yang bekerja pada usahatani campuran (*mixed farming*) dan jasa (pertanian, perkebunan, dan peternakan). Berdasarkan pemilahan tenaga kerja yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa dalam tahun 2000 jumlah tenaga kerja yang bekerja di kedua sub sektor ini terhitung sebesar 1.138.198 orang, sedangkan pada tahun 2001 mencapai 1.803.663 orang, dan pada tahun 2002 berjumlah 1.545.963 orang. Perkembangan jumlah tenaga kerja pada sub sektor *mixed farming* dan jasa ini terkait dengan dukungan program pemerintah (Departemen Pertanian) dalam memfasilitasi berkembangnya usahatani terpadu mulai tahun 2000.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Pertanian Tahun 1992-2003

Tahun	Tan Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian (TPH, Bun, Nak)	% thdp Nasional
1992	18.876.668	11.086.297	7.132.289	2.785.782	39.881.036	50,79
1993	17.499.678	10.277.588	6.515.197	3.265.082	37.557.545	47,42
1994	14.529.255	8.533.054	8.272.132	3.780.748	35.115.189	42,80
1995*	15.303.750	8.987.916	8.007.043	3.528.079	35.826.788	41,48
1996	14.264.818	8.377.750	7.741.955	3.275.410	33.659.933	39,27
1997	13.936.952	8.185.194	8.015.951	2.945.348	33.083.445	38,01
1998	16.820.917	9.878.951	8.427.644	3.205.649	38.333.161	43,72
1999	15.945.427	9.364.774	8.561.483	3.036.820	36.908.504	41,51
2000	16.959.240	9.960.188	9.105.823	1.972.192	37.997.443	42,29
2001	15.909.832	9.343.870	8.542.371	2.611.259	36.407.332	40,08
2002	16.439.490	9.654.938	8.826.757	2.706.135	37.627.320	42,23
2003**	16.665.733	9.787.812	8.971.202	2.913.724	38.338.471	42,23

* Data interpolasi, karena pada tahun 1995 dilakukan Supas

** Prediksi proporsi menurut sub sektor berdasarkan persentase sesuai dengan kondisi th 2002

Sumber: Sakernas (BPS), berbagai terbitan yang diolah kembali

Catatan: Tahun 1992-1997, yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas
Tahun 1998-2002, yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas

B. Struktur Tenaga Kerja Pertanian

Perkembangan ketenagakerjaan pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan) dalam sepuluh tahun terakhir memperlihatkan laju pertumbuhan sebesar 0,4% (Tabel 2). Tenaga kerja pertanian kelompok usia 15-29 tahun cenderung menurun setiap tahunnya, sedangkan penambahan terlihat pada kelompok usia di atasnya, terutama pada kelompok usia di atas 65 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bergesernya tenaga kerja produktif muda ke dewasa tidak diikuti dengan penambahan dari generasi dibawahnya. Kondisi ini memperlihatkan adanya kecenderungan semakin berkurangnya minat generasi muda di sektor pertanian. Bila perkembangan tenaga kerja dicermati lebih jauh terlihat bahwa tenaga kerja perempuan pada kelompok usia 15-29 tahun dan kelompok 30-64 tahun cenderung menurun dengan laju masing-masing -3,40% dan -0,05%. Namun pada kelompok usia di atas 65 tahun, jumlah tenaga kerja perempuan terlihat melonjak dengan laju pertumbuhan sebesar 2,29%. Dengan gambaran ini, dapat dikatakan bahwa kontribusi tenaga kerja perempuan dalam sektor pertanian tidak dapat diabaikan.

Tabel 2. Perkembangan Tenaga Kerja Pertanian*) Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 1992 - 2003

Tahun	15- 29 tahun		30 - 64 tahun		>=65		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1992	8.012.150	5.359.091	13.620.250	9.474.167	2.802.771	1.116.962	40.385.391
1993	7.440.480	4.853.995	13.194.887	9.180.785	2.785.524	1.055.446	38.511.117
1994	6.778.160	4.553.987	12.452.106	8.900.548	2.174.529	1.112.765	36.512.095
1996	6.636.297	4.184.222	12.635.870	8.851.515	2.894.292	1.298.114	36.500.310
1997	6.125.321	3.768.994	12.070.661	8.447.281	3.051.836	1.325.834	34.789.927
1998	7.115.694	4.230.873	13.413.161	9.765.795	3.342.418	1.546.824	39.414.765

Lanjutan.....

Tahun	15- 29 tahun		30 - 64 tahun		>=65		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1999	7.050.822	3.936.013	13.491.382	9.316.510	3.222.103	1.361.303	38.378.133
2000	6.948.704	4.521.682	21.101.492	9.849.447	3.429.187	1.644.038	40.545.853
2001	6.756.729	4.005.017	14.842.029	9.527.924	3.150.760	1.461.379	39.743.908
2002	6.841.672	3.822.504	15.311.767	9.781.780	3.468.517	1.407.387	40.633.627
2003	7.309.387	3.790.036	16.443.250	9.425.226	3.632.631	1.400.907	42.001.437
Laju (%)	-0,914	-3,40	1,90	-0,05	2,63	2,29	0,39

*) Pertanian termasuk kehutanan dan perikanan

**) Supas 1995, BPS

Sumber : BPS berbagai terbitan yang diolah kembali

11.099.423

Ditinjau dari tingkat pendidikan, data periode 1992 hingga 2003 menunjukkan bahwa tenaga kerja pertanian umumnya berlatarbelakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau kurang. Namun demikian, bila dicermati lebih jauh, pada tahun 1998 mulai terjadi lonjakan jumlah lulusan SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi yang terserap ke sektor pertanian. Gambaran ini secara tidak langsung menyiratkan bahwa sektor pertanian masih menarik bagi tenaga kerja yang berpendidikan tinggi (SLTA keatas) terutama pada masa krisis ekonomi. Suatu gambaran yang berlawanan dengan pandangan umum yang menyatakan bahwa sektor pertanian kurang diminati oleh tenaga kerja yang berpendidikan tinggi. Data ini menjelaskan pula bahwa sektor pertanian merupakan sektor penyangga permasalahan ketenagakerjaan di era krisis ekonomi, karena mereka yang kehilangan pekerjaan dan atau sulit mendapat pekerjaan cenderung beralih ke sektor pertanian (Tabel 3).



Tabel 3. Perkembangan Tenaga Kerja Pertanian Berdasarkan Pendidikan Tahun 1992-2003

Tahun	<=SD		SLTP		SLTA		Akademi/PT	
	L	P	L	P	L	P	L	P
1992	22.192.064	15.436.783 ^{41.04}	2.376.513	843.634	977.364	248.419	57.657	20.771
1993	21.158.681	14.499.515	2.254.018	796.578	1.008.575	266.197	64.197	24.107
1994	19.624.115	13.874.335	2.111.603	840.277	1.053.457	283.847	56.270	13.595
1996	19.394.612	13.485.353	2.322.168	901.198	1.204.291	319.837	80.459	12.333
1997	18.458.421	12.652.572	2.299.512	906.407	1.126.895	312.203	75.090	17.531
1998	19.313.227	13.977.426	2.959.983	1.131.701	1.511.339	405.351	86.724	29.014
1999	18.657.292	12.984.986 ^{41.04}	3.331.013	1.213.743 ^{26.71}	1.679.446	401.877 ^{19.31}	96.556	13.220 ^{12.04}
2000	19.397.765	14.041.195 ^{41.94}	3.303.890	1.394.571 ^{29.68}	1.732.631	561.658 ^{34.48}	96.393	17.750 ^{15.55}
2001	19.138.395	13.153.559 ^{40.73}	3.784.627	1.414.952 ^{27.21}	1.720.042	412.391 ^{19.34}	106.524	13.418 ^{11.19}
2002	19.842.413	13.121.946 ^{39.81}	3.926.864	1.420.521 ^{26.56}	1.753.511	449.191 ^{20.39}	99.168	20.013 ^{16.79}
2003	19.744.502	12.203.390 ^{38.20}	5.451.222	1.923.744 ^{26.08}	2.100.248	477.269 ^{18.52}	89.296	11.766 ^{11.64}

L = Laki-laki ; P = Perempuan

*) Supas 1995, BPS

C. Status Usaha Pertanian

Usaha pertanian dapat dikelompokkan dalam usaha sendiri, usaha yang dibantu oleh buruh baik buruh tetap maupun tidak tetap, tenaga buruh dan tenaga yang tidak dibayar. Gambaran jumlah tenaga pertanian menurut usaha pertanian dapat dilihat pada Tabel 4. Secara umum tenaga kerja pertanian pada masing masing usaha cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pengecualian terlihat pada tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan yang berstatus "buruh/karyawan" yang cenderung terus menurun dari tahun ke tahun. Tabel 6 juga memperlihatkan bahwa tenaga kerja perempuan paling banyak berstatus "kelompok pekerja tidak dibayar". Status tenaga kerja perempuan di sektor pertanian seperti ini pada dasarnya telah

berdampak pada rendahnya akses perempuan petani terhadap informasi, teknologi dan sumberdaya pertanian lainnya karena dianggap sebagai pekerja *ikutan*.

Tabel 4. Perkembangan Tenaga Kerja Pertanian Berdasarkan Status Pekerjaan Utama Tahun 1992-2003 (000 Orang)

Tahun	Berusaha sendiri		Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap		Berusaha dg Buruh Tetap		Buruh/Karyawan		Pekerja Tidak Dibayar	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1992	4.956,4	1.219,9	11.727,0	2.160,5	145,6	44,0	2.942,0	1.934,6	5.832,5	11.190,6
1993	4.858,8	1.238,5	11.229,5	2.013,7	164,0	49,0	3.030,5	1.924,5	5.202,6	10.360,6
1994	4.436,7	1.344,7	10.529,7	2.273,5	147,59	48,7	3.178,3	1.671,9	4.553,3	9.673,2
1996	4.753,8	1.472,7	11.230,2	3.253,2	204,5	110,3	3.154,3	1.788,0	3.658,7	8.094,5
1997	5.259,3	1.511,9	9.687,0	1.958,0	329,1	106,7	3.030,5	1.782,0	3.654,1	8.530,1
1998	5.618,4	1.565,1	11.065,9	2.706,3	355,4	108,7	3.247,6	1.962,5	3.583,9	9.200,8
1999	6.110,4	1.506,7	10.229,9	2.412,9	617,9	376,3	3.359,9	2.052,4	3.446,2	8.265,5
2000	4.809,0	1.281,4	12.301,2	2.412,1	457,1	237,7	3.345,5	2.079,2	3.617,8	10.004,8
2001	3.467,0	715,8	12.732,7	2.166,4	777,4	118,9	2.130,4	681,774	3.519,3	9.801,1
2002	3.649,9	864,8	13.438,0	2.965,4	818,9	134,1	1.748,7	582.162	3.157,5	8.762,6
2003	3.406,2	621,4	14.395,2	2.032,2	933,4	99,6	1.612,0	488.374	4.057,2	9.800,6

L = Laki-laki ; P = Perempuan
 *) Supas 1995, BPS

D. Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian

Produktivitas tenaga kerja pertanian dapat didekati dari pengukuran terhadap curahan waktu kerja dan pendapatan per kapita tenaga kerja.

Curahan Waktu Kerja

Berdasarkan curahan waktu untuk pekerjaan utama, tenaga kerja dapat dikelompokkan atas golongan *unemployed* (tidak bekerja pada saat pencacahan), *underemployed* (bekerja kurang dari 35 jam per minggu), dan *full employed* (bekerja selama 35 jam ke atas per minggu). Kondisi tenaga kerja pertanian selama periode 1992-2003 menunjukkan bahwa kelompok *unemployed* cenderung bertambah, baik pada tenaga kerja laki-laki maupun perempuan. Sedangkan tenaga kerja yang tergolong *underemployed* (setengah menganggur) paling banyak jumlahnya dibandingkan yang lain dengan rata-rata lebih dari 20 juta orang setiap tahun. Hal ini menjelaskan bahwa tidak semua pekerjaan dalam usahatani membutuhkan curahan waktu yang tinggi karena sangat terkait erat dengan jenis komoditas yang diusahakan, besarnya skala usaha, dan musim (tanam, pemeliharaan, panen). Adapun jumlah tenaga kerja penuh (*full employed*) dalam dua tahun terakhir (2002 dan 2003) cenderung meningkat dan bahkan telah melampaui jumlah yang pernah dicapai pada masa sebelum krisis. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan iklim usaha yang telah mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha di sektor pertanian (Tabel 5).

Tabel 5. Perkembangan Tenaga Kerja Pertanian Berdasarkan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Tahun 1992 - 2003 (000 orang)

Tahun	Unemployed			Under Employed			Full Employed		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1992	389,8	603,2	992,9	10.984,6	11.368,0	22.352,6	14.229,3	4.578,4	18.807,7
1993	538,9	715,8	1.142,2	10.469,1	10.587,6	21.056,7	13.477,4	4.283,0	17.760,4
1994	647,0	885,5	1.532,5	10.036,6	9.904,3	19.940,9	12.161,9	4.222,2	16.384,1
1996	715,1	799,8	1.514,9	10.179,0	10.407,3	20.586,3	12.107,4	3.511,7	15.619,1
1997	691,8	914,9	1.606,7	9.231,2	9.477,4	18.708,6	12.036,9	3.496,5	15.533,3
1998	561,9	712,0	1.273,9	10.254,6	11.138,1	21.392,7	13.054,8	3.693,4	16.748,2
1999	696,4	708,4	1.404,8	10.208,1	10.222,5	20.430,6	12.859,8	3.683,0	16.542,8
2000	580,1	760,1	1.340,2	10.219,5	10.833,7	21.053,2	13.731,1	4.427,1	18.158,2
2001	737,2	977,7	1.714,8	9.442,3	9.624,9	19.067,3	14.570,1	4.391,7	18.961,8
2002	882,7	950,3	1.833,0	10.502,0	9.592,2	20.094,2	14.237,2	4.469,2	18.706,4
2003	957,5	962,8	1.920,3	11.266,5	9.408,6	20.675,2	15.161,2	4.244,8	19.406,0
Rata-rata	666,1	801,3	1.456,1	10.335,1	10.294,0	20.629,1	13.305,7	4.060,9	17.366,6

Sumber : Sakernas, BPS.

*) Supas 1995, BPS

Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita yang dimaksud disini diukur dari total nilai tambah (PDB) yang dihasilkan dengan total tenaga kerja yang terlibat. Perkembangan pendapatan per kapita tenaga pertanian tersebut tercantum dalam Tabel 6.

Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian sangat besar, namun pendapatannya tertinggal jauh dari tenaga kerja di sektor non pertanian. Pendapatan per kapita tenaga kerja pertanian ternyata hanya sekitar sepertiga dari rata-rata tenaga kerja seluruh sektor (tenaga kerja nasional).

Itupun masih diikuti oleh pertumbuhan pendapatan yang lebih rendah. Data empiris ini membuktikan bahwa secara absolut maupun relatif, produktivitas kerja sumberdaya manusia di sektor pertanian semakin tertinggal jauh dari sektor ekonomi lainnya.

Tabel 6. Perkembangan Pendapatan Tenaga Kerja (Rp 000/Kapita)

Tahun	Tan Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian (TPH, Bun, Nak)	Nasional
1992	1115,312	1036,110	1384,095	2104.257	1176,198	3942,852
1993	1186,546	1102,285	1383,688	1899.799	1259,694	4163,438
1994	1398,491	1299,179	1147,951	1706.276	1348,476	4320,425
1995*	1393,119	1294,188	1237,910	1924,560	1385,946	4443,961
1996	1526,105	1417,730	1337,517	2177.743	1519,165	4828,215
1997	1517,486	1409,724	1309,514	2540.617	1531,521	4977,438
1998	1282,775	1191,680	1246,137	2008.954	1311,971	4292,463
1999	1380,067	1282,064	1250,017	2251.368	1396,724	4266,711
2000	1317,482	1223,923	1177,488	3580.280	1376,856	4407,875
2001	1393,240	1294,301	1326,564	2800.565	1453,141	4533,379
2002	1359,136	1262,618	1326,564	2765.937	1430,503	4791,126
2003**	1361,494	1264,810	1384,095	2658.110	1440,642	4895,670

* Data interpolasi, karena pada tahun 1995 dilakukan Supas

** Prediksi proporsi menurut sub sektor berdasarkan persentase sesuai dengan kondisi th 2002

Sumber: Sakernas (BPS), berbagai terbitan yang diolah kembali

Catatan: Tahun 1992-1997, yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas
Tahun 1998-2002, yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas

E. Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja Pertanian

Selama ini sektor pertanian telah mampu menampung sejumlah besar tenaga kerja pertanian. Hasil perkiraan kebutuhan tenaga kerja pada setiap sub

sektor yang dihitung berdasarkan sasaran luas areal (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) dan populasi ternak (peternakan), menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di sektor pertanian sebesar 36.390.823 jiwa. Dasar perhitungan perkiraan kebutuhan tenaga kerja untuk setiap sub sektor dapat dilihat pada lembar lampiran. Secara rinci kebutuhan tenaga kerja sektor pertanian disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Perkiraan Kebutuhan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2005

No.	Subsektor	Kebutuhan T.K.	T.K. Nyata	Kesenjangan
1.	Tanaman Pangan	7.755.161	16.665.733	+ 8.910.572
2.	Hortikultura	3.160.105	9.787.812	+ 6.627.707
3.	Perkebunan	18.604.334*)	8.971.202	- 9.833.132
4.	Peternakan	6.671.223*)	2.913.724	- 3.757.499
Total		36.390.823	38.338.471	+ 1.947.648

Keterangan : *) Perkiraan tahun 2004 dengan asumsi pada tahun 2005 tidak ada perubahan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa jumlah tenaga kerja pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura saat ini sangat jauh melampaui jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan menurut luas areal tanam dan panen, serta jenis pekerjaan yang dilakukan mulai tanam hingga panen untuk setiap komoditas. Pada kedua sub sektor ini pengembangan usaha perlu difokuskan pada kegiatan di hilir (pengolahan, pemasaran hasil, dan jasa) dan agroindustri. Untuk itu pengembangan dan penerapan teknologi mekanisasi perlu diintegrasikan. Sementara itu, sub sektor perkebunan dan peternakan masih dapat menampung sejumlah besar tenaga kerja. Pengembangan usaha pada sub sektor perkebunan dan peternakan dapat difokuskan pada kegiatan di hulu



dan *on-farm* dikaitkan dengan upaya perluasan lahan perkebunan/peningkatan populasi ternak.

Kebutuhan tenaga kerja sektor pertanian seperti tampak pada Tabel 7 belum memperhitungkan digunakannya alat dan mesin pertanian. Apabila faktor alsintan, khususnya traktor diperhitungkan dalam kegiatan usahatani pada subsektor tanaman pangan, maka akan terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja pada subsektor tersebut. Hasil penelitian Simatupang (1981) menunjukkan bahwa penggunaan traktor akan menggeser tenaga kerja dari 73 HOK menjadi 47 HOK (pada musim hujan). Sedangkan pada musim kemarau, penggunaan traktor menggeser tenaga kerja dari 70 HOK menjadi 43 HOK. Dengan demikian penggunaan alat mesin traktor dapat menggeser tenaga kerja pertanian sebesar 26 – 27 HOK.

Sebagai ilustrasi, jika diasumsikan pada seluruh areal tanaman pangan digunakan alat mesin traktor, maka perkiraan kebutuhan tenaga kerja pada subsektor ini akan berkurang sebesar 1.674.005 orang (21,59 %). Ilustrasi ini dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Perkiraan Kebutuhan Tenaga Kerja Subsektor Tanaman Pangan

No.	Komoditas	Perkiraan Kebutuhan TK (Orang)
1	Padi	3.924.913
2	Jagung	1.228.069
3	Kedelai	185.756
4	Kacang Tanah	272.027
5	Kacang Hijau	79.122
6	Ubikayu	355.913
7	Ubijalar	35.356
Total		6.081.156



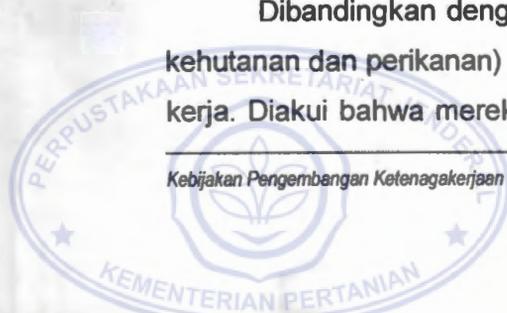
III. ANALISIS STRATEGIS KETENAGAKERJAAN PERTANIAN

A. Kekuatan

Tenaga kerja di sektor pertanian merupakan faktor penting bagi berjalannya suatu usaha. Di satu sisi, sebagai input produksi, jumlah yang besar merupakan potensi bagi berkembangnya usaha di bidang pertanian. Disisi lain jumlah penduduk yang besar juga merupakan potensi pasar konsumsi dari produk pertanian. Sampai dengan tahun 2003 jumlah tenaga kerja pertanian mencapai 42,23% dari total tenaga kerja nasional.

Penyerapan tenaga kerja pertanian sebagian besar berada pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, diikuti dengan sub sektor perkebunan dan peternakan. Selama periode 1992 -1999, laju penyerapan tenaga kerja diantara ke-empat sub sektor menunjukkan arah yang berbeda (lihat Tabel 1). Pada periode tersebut subsektor tanaman pangan dan hortikultura cenderung menurun penyerapan tenaga kerjanya, sebaliknya pada subsektor perkebunan dan peternakan penyerapan tenaga kerja terus meningkat walaupun dengan kenaikan yang semakin kecil. Tahun 2000 terlihat adanya lonjakan pertambahan jumlah tenaga kerja pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, sementara pada subsektor peternakan terjadi penurunan sekitar 30 persen. Namun, pada periode 2001 hingga sekarang kembali terlihat adanya kecenderungan pertambahan jumlah tenaga kerja pada semua subsektor.

Dibandingkan dengan sektor lain, lapangan usaha pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan) dinilai sangat dominan dalam menyerap kesempatan kerja. Diakui bahwa mereka yang relatif terdidik cenderung memilih pekerjaan



di luar sektor ini, namun kesempatan kerjanya tergolong langka. Oleh karena itu, pengembangan lapangan usaha di sektor ini dipandang penting untuk diprioritaskan. Menurut Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2004), dalam kurun 2005 - 2009 pertumbuhan nilai tambah lapangan usaha sektor pertanian dalam arti luas diperkirakan rata-rata sebesar 2,7 persen per tahun dengan penciptaan tambahan kesempatan kerja sebanyak 1,4 juta orang. Dalam dokumen Rencana Tenaga Kerja Nasional 2004 - 2009, diperkirakan total penduduk yang bekerja di lapangan usaha pertanian pada tahun 2009 berjumlah 42,4 juta orang. Namun demikian, perkiraan kesempatan kerja ini hanya dapat dicapai apabila konsep padat karya (*labor intensive*) dipertahankan dalam kebijakan dan strategi pembangunan di sektor ini (Depnakertrans dan BPS, 2004).

Kegiatan usaha yang digeluti di bidang pertanian meliputi bidang usaha yang sangat luas, mulai dari kegiatan usaha di tingkat hulu (perbibitan, perbenihan, pembuatan pupuk, dll), kegiatan budidaya, hingga usaha di tingkat hilir (pengolahan, pemasaran, jasa alsintan, dan lainnya). Setiap kegiatan usaha tersebut memiliki sub bidang usaha yang keragamannya sangat luas sesuai dengan keragaman komoditas pertanian yang dikembangkan.

B. Kelemahan

Masalah pokok yang dihadapi sektor pertanian selama ini adalah produktivitas yang rendah. Rendahnya produktivitas pertanian disebabkan oleh: (1) tingkat pendidikan tenaga kerja pertanian yang rendah, (2) rendahnya produktivitas tenaga kerja pertanian, (3) kesenjangan gender, (4) rendahnya



tenaga kerja yang bekerja penuh waktu (*full employed*), dan (5) kesenjangan *supply demand* tenaga kerja pertanian.

1. Pendidikan

Salah satu ukuran kualitas sumberdaya manusia adalah pendidikan formal yang dicapai. Pada tahun 1992 sebanyak 50,0% tenaga kerja di sektor pertanian tidak menamatkan SD, 39,0% tamat SD, sedangkan yang tamat SLTP hanya 8%. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, tampak adanya perbaikan, sekalipun berjalan dengan sangat lamban. Data pada tahun 2002 menunjukkan adanya perbaikan tingkat pendidikan tenaga kerja pertanian dimana yang tidak sekolah dan tidak tamat SD menjadi 35,0%, tamat SD 46%, dan tamat SLTP 13%. Dibandingkan dengan sektor non pertanian, pada tahun yang sama (2002), tingkat pendidikan tenaga kerja yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD sebesar 14%, tamat SD 31%, tamat SLTP dan SLTA sekitar 20% dan 27%. Tingginya tingkat pendidikan di sektor non pertanian ini sebagian besar berasal dari mereka yang melakukan urbanisasi atau yang meninggalkan sektor pertanian di perdesaan.

Perkembangan selama periode tahun 1992 - 2002 menunjukkan adanya peningkatan pangsa tenaga kerja di sektor pertanian pada kelompok tingkat pendidikan SMP, SLTA dan Akademi/Perguruan Tinggi, sementara pangsa kelompok SD tidak tamat dan tidak sekolah cenderung menurun. Meningkatnya pangsa kelompok tenaga kerja terdidik kenyataannya membawa *trait off*, yaitu dengan meningkatnya arus mobilitas tenaga kerja dari desa ke kota. Beberapa hasil kajian mengindikasikan bahwa umumnya migrasi didominasi oleh kelompok usia muda dan terdidik. Namun kenyataan akhir-akhir ini memperlihatkan migrasi tidak lagi hanya terbatas bagi

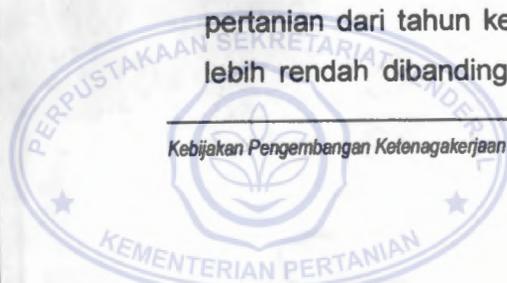


kelompok tersebut. Meskipun secara absolut tidak diperoleh angka frekuensi migrasi, namun mobilitas tenaga kerja cenderung terus meningkat. Faktor utama yang mendorong laju mobilitas tenaga kerja adalah insentif yang lebih besar di tempat tujuan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya taraf hidup keluarga migran di desa dibandingkan dengan rata-rata rumah tangga bukan migran. Oleh karena itu, tingginya tingkat migrasi desa-kota atau perpindahan pekerjaan pertanian ke non pertanian secara permanen harus dipandang sebagai gejala positif dalam upaya pembangunan pertanian, terutama dalam kaitannya dengan upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja.

2. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian jauh lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja nasional. Keadaan ini berkaitan erat dengan struktur usaha di sektor pertanian yang menggantungkan pada produktivitas lahan dan masih bersifat intensif tenaga kerja. Selain itu, luas lahan tetap atau menurun sedangkan tenaga kerja terus bertambah.

Bila dilihat dari laju pertumbuhan produktivitas sektor pertanian pada kurun waktu 1992-2003, tampak pertumbuhan yang positif, yaitu rata-rata sebesar 2,04% per tahun. Pada tahun 1992 produktivitas pertanian per tenaga kerja adalah Rp 1.176.198,- sedangkan produktivitas tingkat nasional sebesar Rp 3.942.852,-. Produktivitas tenaga kerja pertanian pada tahun 2003 mencapai Rp 1.440.642,- sedangkan produktivitas tenaga kerja nasional sebesar Rp 4.895.670,-. Meskipun laju produktivitas tenaga kerja pertanian dari tahun ke tahun positif, namun laju kenaikan tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan tenaga kerja secara



nasional. Hal ini antara lain disebabkan oleh lambatnya peralihan tenaga kerja keluar sektor pertanian sehingga besarnya jumlah tenaga kerja di sektor ini menghambat laju peningkatan produktivitas tenaga kerja pertanian secara keseluruhan. Hal lain yang diduga menghambat laju peningkatan produktivitas tenaga kerja di sektor ini adalah menumpuknya tenaga kerja pada kegiatan budidaya dimana tingkat pendapatannya rendah.

3. Kesenjangan Gender

Suhaeti, dkk (2004) mencatat bahwa saat ini terdapat kurang lebih 21,74 juta Rumah Tangga Petani (RTP) di Indonesia. Sekitar 40 persen RTP merupakan rumah tangga tidak mampu dan 20 persen diantaranya dikepalai oleh perempuan. Pada daerah-daerah dimana tingkat migrasi tenaga kerja laki-laki tinggi, beban kerja sektor pertanian bergeser kepada tenaga kerja perempuan dan kelompok lanjut usia. Sementara itu, akses mereka terhadap sumberdaya pertanian seperti lahan, air, informasi, dan teknologi pertanian sangat terbatas. Secara sosial budaya tenaga kerja perempuan dianggap hanya sebagai tenaga kerja pendamping, sehingga selama ini mereka tidak menjadi bagian langsung dari pembinaan. Sasaran pembangunan pertanian adalah keluarga petani. Namun, penerima manfaat pembangunan pertanian pada umumnya adalah keluarga tani yang dikepalai oleh laki-laki, sedangkan keluarga tani yang dikepalai oleh perempuan cenderung tidak tersentuh oleh berbagai program pembangunan pertanian.

Pergeseran peran antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan yang terjadi di tingkat lapangan diakui secara fakta sebagai dinamika sosial, namun belum diikuti dengan adanya dokumentasi data dan informasi yang memadai. Tersedianya data tenaga kerja pertanian yang terpilah menurut jenis kelamin perlu dikembangkan sebagai dasar pertimbangan dalam



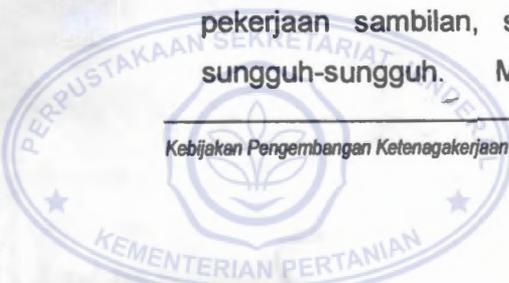
penetapan *target beneficiaries* strategi, kebijakan operasional dan program pembangunan.

Hasil pengamatan de Rosan, dkk (1998) menunjukkan bahwa pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin di masyarakat terjadi berdasarkan beban kerja dan jenis pekerjaan dalam usahatani yang digeluti. Curahan waktu kerja, proses dan pengambilan keputusan umumnya dihubungkan dengan dominasi keterlibatan dalam pekerjaan tersebut. Secara fisik laki-laki menyumbangkan tenaganya sebesar 47,32 persen dan perempuan sebesar 52,68 persen dari total curahan waktu kerja. Pola relasi antara laki-laki dan perempuan bersifat spesifik secara sosial budaya. Kondisi tersebut berdampak pada pembagian peran dan tanggung jawab yang berbeda antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga pertanian.

4. Rendahnya Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja Penuh

Selain dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, produktivitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh jumlah waktu yang tercurah untuk bekerja. Hingga tahun 2003, komposisi angkatan kerja menganggur dan setengah menganggur (bekerja kurang dari 35 jam seminggu) di sektor pertanian lebih besar dari mereka yang bekerja penuh (*full employed*), yaitu mencapai 54,8%.

Rendahnya penguasaan lahan dan rendahnya keterampilan petani diduga terkait dengan lamanya waktu yang tercurah untuk mengerjakan pekerjaan di sektor pertanian dalam sehari. Kondisi ini diduga juga terkait dengan banyaknya pekerja yang menyatakan kegiatan pertanian sebagai pekerjaan sampingan, sehingga usaha pertanian tidak dikelola dengan sungguh-sungguh. Meskipun demikian, pada umumnya diakui hasil



pertanian (terutama ternak) merupakan penunjang utama ekonomi keluarga pada kondisi mendesak, seperti keperluan biaya sekolah, anggota keluarga sakit, perhelatan, dll.

5. Supply dan Demand Tenaga Kerja Pertanian

Secara umum dapat digambarkan bahwa *supply*/penawaran tenaga kerja pertanian cukup tinggi, namun *demand* atau lapangan kerja yang tersedia di sektor pertanian makin terbatas. Secara parsial di beberapa daerah telah mulai terjadi kekurangan tenaga kerja pertanian oleh karena mengalirnya tenaga kerja potensial pertanian ke sektor lain yang lebih menarik (industri dan jasa), sehingga walaupun secara nasional terjadi *excess of supply* namun secara regional dapat terjadi kekurangan tenaga kerja pertanian.

Kelompok muda terdidik dengan latar belakang pendidikan pertanian relatif banyak. Jumlah tenaga kerja pertanian potensial ini dapat dilihat dari banyaknya perguruan tinggi yang memiliki fakultas pertanian dan sekolah kejuruan pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada umumnya penyebaran tenaga kerja yang terdidik lebih banyak berada di kota-kota besar. Walaupun mereka berasal dari pedesaan (wilayah pertanian) namun setelah menyelesaikan pendidikan merasa enggan untuk bekerja di sektor pertanian. Alasan yang sering dikemukakan adalah pandangan bahwa pekerjaan pertanian digeluti oleh mereka yang pendidikannya rendah dan pekerjaannya kasar. Kehidupan petani dinilai sulit sehingga anak petani diupayakan meraih pendidikan tinggi dan dimotivasi untuk hidup lebih baik dari pekerjaan lain di luar pertanian.



C. Peluang

Pengalaman memelihara kestabilan perekonomian dalam situasi krisis belakangan ini merupakan modal yang besar bagi pembangunan pertanian, yaitu dapat memperkecil tingkat resiko investasi di Indonesia. Keadaan ini akan memberikan *peluang bagi peningkatan penanaman modal dalam negeri atau modal campuran di Indonesia untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian dan agroindustri serta mempercepat proses alih teknologi*. Kestabilan perekonomian juga memberikan peluang untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam pembangunan pertanian.

Letak geografis Indonesia memberikan peluang yang besar untuk memanfaatkan perkembangan ekonomi yang pesat di kawasan Asia Pasifik. Indonesia yang luas dan menyebar disepanjang khatulistiwa menyebabkan hasil pertanian nasional memiliki keunggulan dalam arti kedekatannya terhadap pasar di kawasan Asia Pasifik. Hal ini merupakan peluang ekonomi yang besar bagi pembangunan pertanian.

Penduduk Indonesia yang besar merupakan peluang pasar hasil pertanian dan sumber tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pertanian. Apalagi jika dikaitkan dengan potensi jumlah tenaga kerja perempuan yang saat ini sudah banyak berperan aktif di sektor pertanian. Sudah saatnya potensi tenaga kerja perempuan di sektor pertanian mendapat perhatian khusus sehingga kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pertanian mampu merespon aspirasi, kebutuhan, pengalaman, dan permasalahan mereka. Dengan demikian diharapkan optimalisasi tenaga kerja pertanian laki-laki dan perempuan dapat ditingkatkan sejalan dengan dinamika sosial masyarakat karena bersifat spesifik lokalita. Perhatian terhadap adanya tenaga kerja laki-laki dan



perempuan di sektor pertanian berimplikasi pada peluang dikembangkannya teknologi pertanian dan alsintan yang tepat guna, serta metodologi penyampaian informasi yang juga bersifat spesifik lokalita.

Meningkatnya pendapatan masyarakat selama ini berdampak positif terhadap permintaan bahan pangan dan hasil pertanian lainnya. Hal ini mendorong peranserta masyarakat untuk meningkatkan produksi pertanian, baik jumlah maupun kualitasnya. Lebih lanjut perubahan pola konsumsi masyarakat dapat merubah pola produksi pertanian kearah kualitas produksi yang lebih baik. Keadaan ini akan merupakan *peluang bagi tumbuhnya peranserta aktif pelaku ekonomi untuk meningkatkan usaha agroindustri dan hasil pertanian yang berkualitas.*

Sektor pertanian tetap merupakan faktor yang sangat penting dalam periode yang akan datang mengingat peranannya sebagai penyedia pangan dan bahan baku industri, pendorong penciptaan lapangan kerja perdesaan dan sumber devisa. Peranan tersebut untuk masa depan masih tetap berlanjut. Peranan sebagai penyerap berangsur akan menjadi semakin kecil sejalan dengan perubahan struktur ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu terus digali terwujudnya sumber-sumber pertumbuhan baru yang memungkinkan sektor pertanian untuk terus tumbuh, yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pada saat ini masih terdapat sumberdaya pertanian yang belum termanfaatkan secara optimum. Demikian juga masih terdapat faktor-faktor ekonomi yang belum dimanfaatkan. Jika keadaan ini dapat diperbaiki, maka pertanian akan tetap mampu menjadi sektor yang tangguh dan mampu menopang ekonomi nasional. Potensi ekonomi yang belum termanfaatkan tersebut antara lain:



- a. Masih terdapat kesenjangan antara produktivitas riil dan produktivitas potensial komoditas pertanian yang berkisar antara 20-100%, sehingga peningkatan produktivitas masih dapat dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan teknologi biologi dan budidaya, alat, dan mesin
- b. Masih tersedia areal pertanian dan lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal. Disamping itu intensitas tanam pada lahan irigasi juga masih dapat ditingkatkan. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan di sektor pertanian;
- c. Kehilangan dan kerusakan pasca panen masih cukup tinggi, yaitu sekitar 5-20%. Kehilangan ini dapat ditekan dalam upaya peningkatan produksi melalui perbaikan teknologi panen dan pasca panen, serta pemanfaatan alsintan yang tepat guna;
- d. Produk pertanian masih berkualitas rendah, sehingga upaya peningkatan kualitas dan standarisasi produk dapat dipandang sebagai kegiatan yang dapat meningkatkan nilai tambah;
- e. Penggunaan produk pertanian semakin beragam, tidak saja untuk makanan langsung dan ekspor tetapi juga bahan baku industri dan pakan ternak. Diversifikasi penggunaan produk merupakan upaya yang dapat mendorong produksi melalui peningkatan permintaan terhadap produk-produk olahan pertanian;
- f. Insentif investasi dalam kegiatan agribisnis belum mencukupi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan makro ekonomi dan besarnya resiko di bidang agribisnis. Hal yang terakhir berkaitan dengan sifat-sifat alamiah produk pertanian yang mempunyai tingkat ketergantungan tinggi terhadap alam, musim (*bulky*) dan mudah rusak.



Berdasarkan butir-butir tersebut diatas, maka peluang sumber-sumber pertumbuhan pembangunan pertanian dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Sumber pertumbuhan yang berkaitan dengan peningkatan produksi dan produktivitas (diversifikasi, intensifikasi, penerapan teknologi biologi dan mekanis) yang dapat meningkatkan efisiensi teknis;
- b. Sumber pertumbuhan yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah (peningkatan kualitas produk pertanian dan produk olahannya serta pengusahaan tanaman yang bernilai tinggi;
- c. Sumber pertumbuhan yang berasal dari penggalian potensi pertanian (meningkatkan permintaan melalui diversifikasi penggunaan produk, pengolahan dan pemasaran);
- d. Sumber pertumbuhan yang berkaitan dengan kelembagaan (penciptaan iklim usaha yang mendorong investasi, kelangsungan hubungan yang saling mendukung dan menguntungkan antar setiap sub sistem dalam sistem agribisnis, upaya penekanan resiko, dan penurunan biaya produksi).

D. Kendala dan Tantangan

1. Kendala

Terdapat beberapa kendala bagi pengembangan ketenagakerjaan di sektor pertanian, antara lain:

- a. Investasi di sektor pertanian berjalan relatif lambat;
- b. Lambatnya penciptaan kesempatan kerja di sektor industri, karena sifatnya yang padat modal dan keterampilan. Kendala lain yang



mungkin menghambat penciptaan kesempatan kerja produktif di sektor industri adalah adanya strategi substitusi impor di sektor tersebut.

c. Dalam periode pembangunan mendatang, sektor pertanian dihadapkan pada semakin terbatasnya ketersediaan sumberdaya lahan. Dari Sensus Pertanian 1993 diperoleh gambaran penting sebagai berikut:

- Lahan yang dimiliki di Indonesia telah menurun dari 16,78 juta hektar pada tahun 1983 menjadi 15,98 juta hektar pada tahun 1993. Di Jawa tercatat lahan yang dimiliki turun dari 5,55 juta hektar pada tahun 1983 menjadi 4,66 juta hektar pada tahun 1993, sedangkan di luar Jawa naik dari 11,23 juta hektar menjadi 11,32 juta hektar.
- Luas lahan sawah yang dikuasai rumah tangga pertanian juga berkurang dari 5,72 juta hektar pada tahun 1983 menjadi 5,24 juta hektar pada tahun 1993. Di Jawa luas lahan sawah yang dikuasai turun dari 2,95 juta hektar pada tahun 1983 menjadi 2,51 juta hektar pada tahun 1993, sedangkan di luar Jawa lahan sawah turun dari 2,77 juta hektar menjadi 2,73 juta hektar pada periode yang sama.
- Rata-rata luas penguasaan lahan per rumah tangga pertanian juga mengalami penurunan dari 0,98 hektar pada tahun 1983 menjadi 0,83 hektar pada tahun 1993.
- Konversi lahan pertanian di Jawa terjadi akibat perkembangan kawasan industri dan perkotaan yang pesat disertai pembangunan prasarana ekonominya. Pada saat yang sama jumlah lahan tidur di luar Jawa semakin meluas, antara lain diakibatkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya lahan, terbatasnya ketersediaan prasarana,



belum memadainya pengembangan dan penerapan teknologi dan kurangnya insentif ekonomi.

- d. Ketimpangan rasio sumbangan sektor pertanian terhadap PDB dengan sektor non pertanian.

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir ini telah terjadi perubahan struktur rumah tangga pertanian ke rumah tangga non pertanian sebesar $\pm 9,5\%$, yaitu rumah tangga pertanian turun dari 60,5% pada tahun 1983 menjadi 51,1% pada tahun 1993 sedangkan rumah tangga non pertanian naik dari 39,5% pada tahun 1983 menjadi 48,8% pada tahun 1993. Pada waktu yang bersamaan terjadi pula perubahan komposisi rumah tangga di Jawa dan luar Jawa, yaitu 60,5% dan 49,5% pada tahun 1983 menjadi 62,4% dan 39,6%. Perubahan komposisi rumah tangga di Jawa dan luar Jawa yang begitu cepat menunjukkan masih besarnya arus migrasi dari luar Jawa ke Jawa. Rasio petani gurem terhadap total rumah tangga di Indonesia telah menurun dari 29,6% pada tahun 1983 menjadi 26% pada tahun 1993, atau terjadi penurunan sebesar 3,6% selama kurun waktu 10 tahun. Jika dirinci lebih lanjut, jumlah petani gurem di Jawa telah menurun dari 23% pada tahun 1983 menjadi 19,2% pada tahun 1993. Sedangkan di luar Jawa terjadi sedikit peningkatan dari 6,6% pada tahun 1983 menjadi 6,7% pada tahun 1993. Dari kenyataan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa selama 10 tahun terakhir ini pengembangan sektor pertanian telah berhasil menciptakan keseimbangan antara rumah tangga pertanian dengan rumah tangga non pertanian. Namun demikian apabila dikaitkan dengan kontribusi sektor pertanian yang terus menurun, nampaknya akan sangat berat



bagi sektor pertanian yang kontribusinya terhadap PDB pada tahun 1983 diperkirakan \pm 18,5% harus menampung 51,1% dari total rumah tangga nasional, sedangkan sektor non pertanian yang kontribusinya terhadap PDB telah mencapai 81,5% hanya menanggung 48,9% dari total rumah tangga nasional. Ini menunjukkan masih adanya ketimpangan sektoral, khususnya antara sektor pertanian dan sektor non pertanian.

- e. Persaingan yang semakin ketat dalam pemanfaatan sumberdaya air untuk industri, pertanian dan rumah tangga. Disisi lain dapat terjadi penurunan kualitas air sebagai akibat limbah industri, rumah tangga dan penggunaan input pupuk, pestisida dan insektisida.
- f. Kemampuan pemilikan dan penguasaan lahan pertanian yang semakin terbatas, dimana dengan rata-rata penguasaan lahan di bawah 0,5 ha, petani tidak akan bertahan hidup kalau hanya mengandalkan pendapatan dari pertanian.
- g. Tingginya migrasi tenaga kerja laki-laki perdesaan telah mendorong semakin besarnya peran perempuan perdesaan masuk ke sektor pertanian. Sementara itu, akses perempuan selama ini relatif rendah terhadap informasi, teknologi, dan permodalan untuk menunjang usaha pertanian. Kondisi ini dipengaruhi oleh sosial budaya masyarakat yang umumnya menganggap tenaga perempuan adalah tenaga cadangan/ pendamping sehingga tidak dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pertanian.
- h. Daya tarik generasi muda untuk tetap berada atau memulai terjun di sektor pertanian semakin melemah. Hal ini disebabkan oleh adanya citra pertanian yang subsisten, usaha kecil, kondisi kerja yang kumuh,



pertanian sebagai pekerjaan sampingan, dan bila ditekuni penuh resiko serta keuntungan kecil.

- i. Rendahnya penguasaan IPTEK di bidang bisnis pertanian, sehingga menghambat pemanfaatan peluang pasar dan pencapaian efisiensi ekonomi.
- j. Belum optimumnya perkembangan subsistem agroindustri atau pengolahan hasil-hasil pertanian. Walaupun agroindustri telah mulai berkembang, namun dampaknya terhadap perekonomian perdesaan masih cenderung tradisional, skala rumah tangga dan tersebar dalam unit-unit usaha kecil. Sementara itu agroindustri yang menggunakan teknologi maju, padat modal dan skala besar umumnya berada di perkotaan dan kurang mempunyai efek ganda yang besar terhadap perekonomian perdesaan.

2. **Tantangan**

Penurunan pangsa relatif penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian berjalan lambat karena kemampuan sektor industri menyerap tenaga kerja masih lambat. Oleh karena itu, untuk dapat menjaga tercapainya pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi serta meningkatnya sumbangan lainnya dari sektor pertanian, adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja pertanian dan memperluas kesempatan kerja di sektor pertanian terutama di bidang usaha pertanian dan agroindustri. Untuk mericapai hal tersebut, maka tantangan yang dihadapi adalah *peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja pertanian, perluasan usaha pertanian dalam kerangka pengembangan agribisnis dan agroindustri.*



Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian relatif berimbang antara tenaga laki-laki dan perempuan. Peran keduanya bersifat spesifik untuk setiap komoditas pertanian yang diusahakan dan dipengaruhi oleh sosial budaya yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Selama ini fasilitasi pembangunan pertanian yang pada dasarnya ditujukan untuk setiap individu pelaku pembangunan (bersifat netral gender), lebih banyak dinikmati oleh tenaga kerja laki-laki. Kondisi ini terkait dengan tidak efektifnya pendekatan "tetes minyak" (*oil flack approach*) dimana sasaran keluarga tani didekati melalui bapak tani sebagai kepala keluarga dan diharapkan pengetahuan dan keterampilan yang diberikan akan menyebar kepada anggota keluarga petani. Hasil analisis gender dalam berbagai kegiatan di sektor pertanian telah membuktikan tingginya kesenjangan antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan dalam hal akses dan kontrol terhadap sumberdaya produktif, partisipasi dalam kegiatan pembangunan dan manfaat yang diperoleh dari pembangunan. Kondisi ini merupakan tantangan bagi upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui *pemberdayaan tenaga kerja produktif dalam rumah tangga petani yang belum memperoleh manfaat langsung dari pembangunan*. Akses perempuan petani terhadap informasi, teknologi, dan permodalan untuk menunjang usaha pertanian perlu ditingkatkan agar kemampuan yang mereka miliki dapat dikembangkan secara optimum. Cara pandang masyarakat yang umumnya menganggap tenaga perempuan sebagai tenaga kerja tambahan/pendamping merupakan tantangan kedepan dalam rangka *mendorong partisipasi aktif setiap pelaku usaha dibidang pertanian dalam pembangunan pertanian*.



Jumlah tenaga kerja pertanian yang berusia muda (15-29 tahun) pertanian dalam lima tahun terakhir relatif menurun dari 28,62 persen pada tahun 1999 menjadi 26,42 persen di tahun 2003. Sementara itu tenaga kerja terdidik belatar belakang bidang pertanian terus bertambah tetapi mereka tidak tertarik untuk membangun sektor pertanian. Kondisi ini merupakan tantangan bagi upaya *memperbaiki citra pertanian yang kumuh, miskin, dan tidak menguntungkan menjadi bidang usaha yang menarik dan membanggakan*. Perbaikan citra pertanian perlu didukung dengan pengembangan teknologi budidaya dan alat mesin pertanian.

Arus mobilitas tenaga kerja terdidik dari desa ke kota menyebabkan berkurangnya jumlah tenaga kerja pertanian terdidik di perdesaan. Namun demikian, tenaga kerja dengan pendidikan rendah di perdesaan merupakan kekuatan tersendiri bagi pengembangan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian. Reorientasi dan restrukturisasi pembangunan pertanian dari yang semula terfokus pada kegiatan produksi menjadi pola agribisnis yang berorientasi pada pengembangan sistem dan usaha agribisnis telah menyebabkan pola usaha tani masyarakat berubah dari bersifat subsisten ke arah bisnis (komersial) sehingga unsur efisiensi telah menjadi pertimbangan utama. Kondisi ini merupakan tantangan tersendiri bagi *pengembangan dan penyempurnaan alat dan mesin pertanian*.

Besarnya jumlah angkatan kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, memberikan peluang bagi penyerapan kesempatan kerja dalam pengoperasionalan alat dan mesin pertanian. Pemanfaatan alsintan pada seluruh sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) berarti membuka kesempatan kerja bagi tenaga terampil/operator alsin pada sub sektor yang



bersangkutan. Penggunaan alsintan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha. Dalam iklim perdagangan saat ini, pembangunan pertanian dituntut mampu meningkatkan daya saing produk pertanian. Kondisi ini merupakan tantangan bagi *berkembangnya teknologi alsintan yang tepat guna*. Saat ini, lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang alsintan yang tersedia relatif memadai untuk mendidik dan melatih tenaga kerja bidang alat dan mesin. Lembaga tersebut antara lain produsen/industri alat dan mesin pertanian, puslit perekayasa alsin pertanian, lembaga pendidikan perkebunan, perguruan tinggi, dan pengelola UPJA yang maju.

Dengan adanya perdagangan bebas tidak menutup kemungkinan bahwa tenaga kerja bidang alsin pertanian seperti jenis-jenis jabatan tertentu pada pabrik pengolahan hasil perkebunan akan diduduki oleh tenaga kerja asing (TKA). Untuk itu perlu diantisipasi dari sekarang agar pada masa mendatang jumlah tenaga kerja asing tersebut tidak bertambah dan yang saat ini sudah diduduki oleh TKA perlu diupayakan pengantiannya dengan TKI. Untuk dapat mengoperasikan alsin pertanian diperlukan tenaga kerja yang terampil agar penggunaan alsin tersebut efisien. Selain itu diperlukan tenaga ahli dan terampil lainnya untuk perekayasaan dan perbaikan alat jika mengalami kerusakan. Jika tenaga kerja yang terlibat dalam pengoperasian alat dan mesin tersebut berkualitas ada kemungkinan alat dan mesin dapat beroperasi lebih baik dan tahan lama.

Sebagai negara dengan sistem ekonomi yang terbuka dengan pangsa perdagangan internasional cukup besar, globalisasi perdagangan menyebabkan perekonomian Indonesia akan semakin erat terkait dengan perkembangan perekonomian dunia. Oleh karena



itu *peningkatan daya saing produk pertanian untuk memenuhi pasar dalam negeri maupun ekspor* merupakan tantangan dalam pengembangan pasar produk pertanian.

Sejalan dengan tahapan dan keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai, maka tantangan lain adalah *kelanjutan proses transformasi struktur perekonomian nasional* yang dicirikan oleh (a) peran relatif sektor pertanian dan sumbangannya atas PDB dan penyerapan tenaga kerja semakin menurun, (b) pangsa ekspor bahan setengah jadi dan jadi semakin besar, (c) keterkaitan antar berbagai sektor ekonomi semakin tinggi, (d) daerah perdesaan semakin terbuka, dan (e) terjadinya perubahan pola usahatani dari orientasi produksi pada orientasi meraih nilai tambah yang lebih besar.



IV. KEBIJAKAN UMUM DAN STRATEGI KETENAGAKERJAAN PERTANIAN

A. Kebijakan Umum

Pembangunan ketenagakerjaan pertanian merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan pertanian secara keseluruhan. Saat ini telah dilaksanakan reorientasi pembangunan pertanian (1) dari pendekatan produksi kepada pendekatan peningkatan pendapatan petani atau meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian, (2) dari pendekatan komoditas kepada pendekatan sistem usaha pertanian hulu hingga hilir. Sementara itu lingkungan strategis pembangunan juga berubah secara dinamis, baik lingkungan lokal, nasional maupun global. Oleh karena itu kebijakan umum ketenagakerjaan pertanian perlu dirumuskan dan disesuaikan dengan perkembangan tersebut.

Kedepan, kebijakan pembangunan pertanian harus dilihat sebagai bagian yang melekat pada pembangunan nasional dan kebijakan ketenagakerjaan pertanian sebagai bagian dari kebijakan ketenagakerjaan nasional. Merujuk kepada analisis strategis terhadap isu ketenagakerjaan di sektor pertanian dan perkiraan kebutuhan tenaga kerja sektor pertanian, maka kebijakan umum yang perlu ditempuh adalah ***transformasi struktur tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian.***



B. Strategi

Secara spesifik, dengan mempertimbangkan hasil analisis strategis, maka strategi yang ditempuh perlu dipilah dalam dua kelompok strategi, yaitu (1) peningkatan kesejahteraan tenaga kerja pertanian dan (2) peningkatan produktivitas dan kualitas pertanian melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian.

1. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Pertanian

Perhatian utama sasaran pembangunan pertanian yang terkait dengan tenaga kerja manusia adalah pada peningkatan kualitas tenaga kerja pertanian, pemanfaatan teknologi maju, pengembangan usaha pertanian, agroindustri dan kesempatan berusaha. Pengembangan kesempatan usaha tidak harus bertumpu pada bagian proses produksi pertanian saja, tetapi dapat diperluas pada sistem agribisnis lainnya seperti agroindustri, pemasaran dan perdagangan hasil pertanian.

Strategi untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja pertanian adalah:

- **Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Pertanian**

Dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, yang perlu diperhatikan adalah (1) kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penajaman daya nalar, (2) kualitas keterampilan disertai dengan semangat kerja, disiplin dan tanggung jawab, (3) hubungan kelembagaan yang transparan dan adanya keseimbangan pembagian resiko dan keuntungan, (4) peningkatan nilai konsumsi gizi sehingga terbentuk manusia Indonesia yang sehat, dan (5) penerapan

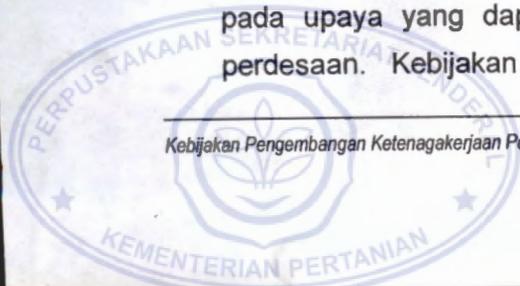


pengarusutamaan gender. Efektivitas pendidikan dan pelatihan bagi sumberdaya pertanian secara dinamis dan berimbang juga ditingkatkan. Orientasi program ini disesuaikan dengan potensi sumberdaya yang akan dikembangkan. Dengan upaya ini kualitas sumberdaya manusia pertanian dapat ditingkatkan dengan orientasi pada pengembangan wilayah setempat. Upaya lain berupa *movement* tenaga kerja ke sektor lain yang lebih menguntungkan merupakan alternatif yang perlu ditempuh.

- **Pemanfaatan Teknologi Maju**

Peningkatan pemanfaatan tenaga mekanis berteknologi maju perlu dilaksanakan secara dinamis dan sesuai dengan kondisi lokal (spesifik lokalita) serta dilaksanakan dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja pertanian. Dengan strategi ini citra sektor pertanian dapat diperbaiki untuk menarik minat generasi muda dan sekaligus dapat mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian.

Catatan : Untuk mempromosikan teknologi mekanis agar dapat diadopsi petani, pada tahap-tahap awal perlu diterapkan kebijakan preferensi untuk merangsang petani memanfaatkan teknologi tersebut. Kebijakan ini akan menyebabkan harga relatif modal per tenaga kerja menjadi lebih murah sehingga petani akan cenderung beralih pada pemanfaatan teknologi relatif padat modal. Dalam jangka pendek keadaan ini akan menyebabkan sebagian pekerja ada yang pindah dari sektor pertanian. Untuk mengatasi hal ini pemanfaatan kesempatan untuk memperluas "batas kemungkinan produksi" yang tercipta dari penerapan teknologi tersebut perlu diarahkan pada upaya yang dapat menciptakan tambahan kesempatan kerja di perdesaan. Kebijakan ini perlu dirancang secara terpadu lintas sektoral,



karena penciptaan kerja tidak harus hanya terjadi di sektor pertanian tetapi juga di sektor ekonomi lainnya di perdesaan.

- **Pengembangan Investasi Pertanian**

Untuk merealisasikan investasi pertanian yang kebutuhannya cukup besar, diperlukan berbagai upaya yang mampu memberikan kondisi kondusif dan insentif bagi investasi pertanian, baik dilakukan swasta melalui PMA, PMDN, swasta non fasilitas PMA/PMDN maupun perseorangan. Secara konseptual, kebijakan investasi pertanian harus mengacu pada upaya menciptakan pertanian modern dan berwawasan lingkungan, yaitu yang menjamin adanya pertumbuhan yang cukup, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, mampu memanfaatkan peluang ekonomi, fleksibel dalam menghadapi dinamika pasar, dan mampu menjaga keberlanjutan produktivitas sumberdaya dan kelestarian lingkungan hidup.

Pengembangan investasi pertanian harus diarahkan untuk:

- a. Pengembangan usaha pertanian di perdesaan;
- b. Peningkatan optimasi pengarahannya dan pemanfaatan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. Pemanfaatan IPTEK dan keragaman lokalita.

- **Pengembangan Usaha Pertanian, Agroindustri serta Kesempatan Berusaha**

Pembangunan agribisnis dan agroindustri di perdesaan pada prinsipnya harus mampu menciptakan kesempatan kerja bagi mayoritas penduduk perdesaan sehingga mampu memberikan alternatif lapangan kerja di perdesaan selain di sektor pertanian. Diversifikasi pertanian adalah



suatu kebijakan untuk pendalaman dan perluasan spektrum pembangunan pertanian yang mencakup teknologi, sumberdaya, energi, pendapatan, produk dan pasar.

Diversifikasi dalam arti vertikal atau penganekaragaman produk dari suatu komoditas adalah perlu untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi komoditas serta nilai tambah. Untuk mendorong pengembangan dan rehabilitasi prasarana di perdesaan mutlak diperlukan. Pembangunan tersebut tidak terbatas pada prasarana untuk mendukung sektor pertanian saja (irigasi, jalan usahatani), tetapi juga fasilitas listrik, air, alat komunikasi serta kelembagaan pendukung serta lembaga perbankan dan pemasaran, investasi, lembaga pendidikan dan pelatihan.

Dalam proses adaptasi terhadap tantangan globalisasi, agribisnis sebagai suatu sistem diperlukan inovasi perekayasaan organisasi usaha yang handal dan kompetitif melalui pengembangan sistem kerjasama kemitraan, yang menyajikan terwujudnya manajemen terpadu dari berbagai subsistem yang menjadi komponen dari agribisnis itu. Dalam rangka untuk mendorong tumbuhnya sistem agribisnis berskala besar yang ditopang organisasi petani yang handal, pengusaha yang bonafid, dan manajemen agribisnis yang menampilkan hubungan kemitraan yang harmonis, diperlukan kehadiran profesi perekayasaan agribisnis dan petani yang tangguh.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut perlu dilakukan rekayasa kelembagaan pertanian pada tingkat desa sehingga diharapkan terjadi percepatan rekayasa kelembagaan pertanian dalam mengimbangi



kecepatan tumbuh dan berkembangnya agroindustri, terutama dalam menangkap sinyal-sinyal pasar. Selain itu, kelembagaan pertanian diharapkan mampu menyediakan bahan mentah dalam kuantitas, kualitas, kualifikasi dan waktu yang sesuai dengan permintaan pasar (agroindustri). Pada gilirannya, kelembagaan pertanian diharapkan akan dapat melakukan redistribusi manfaat ekonomi yang timbul sebagai akibat peningkatan efisiensi dan peningkatan kaitan fungsional dengan agroindustri sehingga akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.

Untuk mengatasi keragaman kualitas sumberdaya manusia, program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan harus disesuaikan dengan spesifikasi dan karakteristik sumberdaya suatu lokasi sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bagi pengembangan daerah tersebut. Selain itu rancangan teknologi pertanian yang akan diintroduksi seyogyanya disesuaikan dengan karakteristik wilayah pengembangan baik dari tinjauan agro ekologi maupun sumberdaya manusianya.

Kebijakan umum dan strategi diatas pada dasarnya meletakkan pengembangan ketenagakerjaan perdesaan dalam kerangka pembangunan perekonomian nasional. Melalui strategi kebijakan ini diharapkan penerapannya tidak terbatas pada pemanfaatan teknologi tradisional, tetapi juga teknologi maju dan padat modal. Dengan demikian pertumbuhan pembangunan pertanian dapat lebih dipercepat, sehingga pembangunan ekonomi perdesaan akan semakin terbuka lebar, dan pada akhirnya pendapatan dan kesejahteraan petani dan penduduk perdesaan akan dapat ditingkatkan.



2. Peningkatan Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian

Kegiatan pertanian pada awalnya menggunakan tenaga kerja manusia dan ternak. Disatu sisi, kehadiran alsintan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu kerja, sekaligus meningkatkan produktivitas tenaga kerja pertanian yang berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja. Namun disisi lain, operasionalisasi alsintan membuka kesempatan bagi tumbuhnya kelembagaan usaha (Unit Pelayanan Jasa Alsintan/UPJA) dan peluang kerja baru bagi tenaga operator alsintan. Oleh karena itu dalam menjalankan usaha di bidang pertanian, pemanfaatan alat dan mesin pertanian merupakan suatu kebutuhan dan merupakan mitra bagi tenaga kerja.

Gejala berkurangnya minat tenaga muda untuk bekerja di sektor pertanian sudah mulai terasa. Apabila hal ini dibiarkan pada masa mendatang maka urbanisasi atau mengalirnya tenaga muda ke kota akan semakin meningkat. Menurut Simatupang (1981), berkaitan dengan perubahan struktur ekonomi, peran mekanisasi pertanian, adalah (1) melepaskan tenaga kerja dari sektor pertanian, (2) menciptakan kondisi yang baik bagi pekerja muda yang tidak ingin lagi bekerja kasar, (3) menciptakan pasar bagi hasil-hasil industri, (4) meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Oleh karena itu, dengan masuknya mekanisasi pertanian diharapkan pekerja muda akan lebih tertarik untuk bekerja di sektor pertanian. Pada saat ini, secara umum alsintan yang tersedia di tingkat lapangan baru mencapai 30-35% dari kebutuhan nasional. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan pemanfaatan alat dan mesin pertanian dan pengembangan SDM penggunaanya.



Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha pertanian, maka strategi yang ditempuh dalam pengembangan alat dan mesin pertanian adalah:

- 1). Memperkuat kelembagaan UPJA dan kelembagaan yang terkait dalam pengembangan alsintan
- 2). Mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan serta mendukung tumbuhnya industri alsintan di dalam negeri
- 3). Mengembangkan jejaring (networking), sinergi (sharing) dan pengalaman (outsourcing) dalam mewujudkan sistem standardisasi (termasuk pengujian dan sertifikasi) serta pengawasan secara efektif, efisien, transparan.
- 4). Meningkatkan kompetensi SDM yang berdedikasi tinggi melalui diklat.



DAFTAR PUSTAKA

Bagian Penyusunan Program. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. 2000. *Profil Sumberdaya Manusia Pertanian 1999*. Departemen Pertanian. Jakarta

Bagian Penyusunan Program. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. 2003. *Profil Sumberdaya Manusia Pertanian - Draft*. Departemen Pertanian. Jakarta

Biro Perencanaan. 1992. *Studi Analisa Ketenagakerjaan dan Energi Sektor Pertanian*. Volume I. Departemen Pertanian. Jakarta

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2004. *Rencana Tenaga Kerja Nasional 2004-2009*. Depnakertrans dan BPS. Jakarta

De Rosan, B.B, Chasanah E, Bachmid S. 1998. *Perspektif Gender pada Sistem Usahatani Ladang suatu Studi di Desa Kabiart Tanimbar Selatan, Maluku Tenggara. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*. Vol 1 No 1, Juli 1988. Hal 69-79. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian. Direktorat Jenderal Bina Sarana dan Prasarana. Departemen Pertanian. 2003. *Buletin Informasi Alat dan Mesin*. Departemen Pertanian. Jakarta



Direktorat Jenderal Bina Sarana dan Prasarana. 2003. *Buku Informasi Direktorat Alat dan Mesin*. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta

Pusat Pengkajian. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. 2003. *Kebijakan Strategi Program Pengembangan Ketenagakerjaan Sektor Pertanian--Bahan Koordinasi Perencanaan Ketenagakerjaan Sektor Pertanian*. Departemen Pertanian, Jakarta

Simatupang, Pancar. 1981. *Kebutuhan terhadap Penggunaan Traktor di Kabupaten Kerawang Dihubungkan dengan Jadwal Irigasi*. *Jurnal Agro Ekonomi*. Vol 1 No 1, Oktober 1981. Hal 1-22. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor

Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Ketenagakerjaan. 2003. *Pengembangan Ketenagakerjaan Pertanian*. Departemen Pertanian. Jakarta

Suhaeti, RN dan Suharni, Sri. 2004. *Inkorporasi Perspektif Gender dalam Pengembangan Rekayasa Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN)*. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol 2 No 1, Maret 2004. Hal 67-76. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor



Lampiran 1. Tahapan Perhitungan Kebutuhan Tenaga Kerja Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

1. Inventarisasi luas panen per komoditas pertahun
2. Inventarisasi tahapan kegiatan on farm, mulai dari persiapan tanam (misalnya pembuatan lubang tanam), penanaman, pemeliharaan, pengendalian hama penyakit sampai dengan pemanenan.
3. Inventarisasi kebutuhan tenaga kerja per tahapan kegiatan on farm.
4. Kalikan jumlah tenaga kerja dengan luas panen (LP)
5. Perhitungan Tenaga Kerja = $\frac{\text{HOK}}{300} \times \text{LP}$
=orang

Keterangan:

HOK = Jumlah Hari Kerja per Hektar

LP = Luas Panen

Nilai 300 = asumsi dalam 1 (satu) tahun terdapat 300 hari kerja

Sumber: Ditjen Bina Produksi Hortikultura, 2004



**Lampiran 2 : Perkiraan Kebutuhan Tenaga Kerja
Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2005**

No.	Komoditi	Sasaran Luas Tanam 2005 (Ha)	Kebutuhan per Ha (HOK)	Kebutuhan TA. 2005 (Orang)
1	Padi	12,526,319	120	5,010,527
2	Jagung	3,684,208	126	1,547,367
3	Kedelai	633,261	114	240,639
4	Kacang Tanah	816,081	126	342,754
5	Kacang Hijau	370,889	90	111,266
6	Ubi Kayu	1,404,920	102	449,574
7	Ubi Jalar	203,979	78	53,034
Total		19,639,657	756	7,755,161

Keterangan : Tenaga Kerja pada komoditi padi biasanya
juga bekerja pada komoditi palawija

Sumber : Ditjen Bina Produksi Tanaman Pangan



Lampiran 3 : Kebutuhan Tenaga Kerja Sub Sektor Hortikultura Tahun 1999 - 2005

(orang)

No.	Komoditi	Tahun						2005**)
		1999	2000	2001	2002	2003	2004*)	
1	Sayuran	2 144 996	2 051 742	1 864 801	2 237 760	2 309 089	2 401 453	2 473 497
2	Buah-Buahan	300 262	351 189	397 470	476 964	620 053	644 856	664 202
3	Tanaman Hias	1 329	1 490	1 159	1 455	1 606	1 670	1 687
4	Tanaman Obat	3 795	5 870	12 521	15 026	19 534	20 314	20 720
	Total	2 450 382	2 410 291	2 275 951	2 731 205	2 950 282	3 068 293	3 160 105

Keterangan : *) Angka Sementara

*) Angka Sasaran

Sumber : Ditjen Bina Produksi Tanaman Hortikultura

Lampiran 4 : Jumlah Tenaga Kerja Perkebunan, Tahun 1998 - 2004

(Orang)

No.	Komoditas	1998	1999	2000	2001	2002	2003*)	2004**)
I	TAN TAHUNAN							
	1. Karet	3,787,660	3,845,596	3,929,293	3,939,903	4,001,013	4,052,358	4,104,438
	2. Kelapa	3,705,974	3,712,071	3,707,026	3,727,911	3,775,611	3,783,311	3,791,111
	3. Kelapa Sawit	3,067,661	3,272,632	3,492,199	3,552,124	3,630,004	3,707,884	3,785,764
	4. Kopi	1,614,717	1,598,863	1,596,223	1,607,143	1,608,823	1,610,503	1,612,183
	5. The	219,855	211,882	211,966	212,755	212,895	213,035	213,175
	6. Lada	130,991	131,103	129,200	129,200	129,330	129,460	129,590
	7. Cengkeh	514,350	515,578	504,887	504,887	504,887	504,887	504,887
	8. Kakao	744,319	756,802	764,804	901,519	798,039	825,339	853,679
	9. Kapok	207,703	207,646	207,675	209,688	212,888	216,888	220,888
	10. Jambu Mente		482,171	492,187	493,207	497,257	501,307	505,357
	11. Pala	53,590	53,933	50,040	52,203	54,925	57,648	60,370
	12. Kayu Manis	107,915	111,581	112,514	103,599	106,299	108,999	111,699
	13. Panili	16,883	17,068	17,151	18,820	20,820	22,820	24,820
	14. Kemiri	139,838	139,361	139,499	140,634	143,834	147,034	150,234
	15. Pinang	70,011	75,670	83,618	76,430	79,630	82,830	86,190
	16. Kapulaga	4,404	4,514	4,510	4,378	4,778	5,178	5,578
	17. Asam Jawa	4,399	4,417	4,418	4,418	4,818	5,218	5,618
	18. Gula Merah	64,429	64,170	64,020	64,020	67,220	70,420	73,620
	Jumlah I	14,454,699	15,205,058	15,511,230	15,742,839	15,853,071	16,045,119	16,239,201
II	TAN.SEMUSIM							
	1. Tebu	1,131,267	1,022,406	1,027,431	1,231,476	1,291,776	1,352,076	1,412,376
	2. Tembakau	743,342	743,580	743,648	749,210	791,960	839,210	890,960
	3. Kapas	57,282	58,146	57,114	70,542	76,542	82,542	88,542
	4. Jarak	56,451	54,738	54,768	54,750	60,750	66,750	72,750
	5. Sereh Wangi	8,577	8,955	9,435	9,057	10,557	12,057	13,557
	6. Serat Karung	9,216	8,985	8,460	10,458	11,958	13,458	14,958
	7. Nilam	31,803	32,190	32,268	31,713	33,213	34,713	36,213
	8. Jahe	29,472	30,660	31,725	31,287	32,787	34,287	35,787
	Jumlah II	2,067,410	1,959,660	1,964,849	2,188,493	2,309,543	2,435,093	2,565,143
	Jumlah I+II	16,999,999	17,164,716	17,476,192	17,931,332	18,162,614	18,480,212	18,804,344

Keterangan :

- *) Angka Sementara
- **) Angka estimasi
- Tenaga kerja Perkebunan dihitung dalam KK Yang terdiri dari Bapak, Ibu dan anak

Sumber : Dirjen Bina Produksi Perkebunan



**Lampiran 5 : Jumlah Tenaga Kerja Sub Sektor
Peternakan Tahun 2003 - 2004**

(orang)

No.	Berdasarkan Jenis Ternak	Jumlah Tenaga Kerja	
		2003	2004
I	RUMINANSIA		
	1. Sapi Potong	2,626,000	2,681,500
	2. Sapi Perah	124,667	127,333
	3. Kerbau	614,750	643,000
	4. Kambing	636,100	672,100
	5. Domba	390,550	412,300
II	NON RUMINANSIA		
	1. Babi	307,550	328,450
	2. Kuda	206,500	216,000
III	UNGGAS		
	1. Ayam Buras	554,714	543,694
	2. Ayam Ras/Petelur	79,206	80,633
	3. Ayam Ras Pedaging	847,744	895,155
	4. Itik	67,726	71,058
Total I+II+III		6,455,507	6,671,223

Jumlah tenaga kerja dihitung berdasarkan sasaran populasi ternak dengan asumsi:

- 4 ekor sapi potong, tenaga kerja sebanyak 1 orang
- 3 ekor sapi perah, tenaga kerja sebanyak 1 orang
- 4 ekor kerbau, tenaga kerja sebanyak 1 orang
- 20 ekor kambing atau domba, tenaga kerja sebanyak 1 orang
- 1000 ekor ayam ras, tenaga kerja sebanyak 1 orang
- 500 ekor ayam buras atau itik, tenaga kerja sebanyak 1 orang
- 20 ekor babi, tenaga kerja sebanyak 1 orang
- 2 ekor kuda, tenaga kerja sebanyak 1 orang

Sumber : Ditjen Bina Produksi Peternakan



TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Muchjidin Rachmat, MS

Koordinator : Ir. Pamela Fadhilah, MA

Tim Penulis : Drs. Diding Hardedi, MM

Ir. Rachmanto

Ir. H. Agustin Z. Karnaen, M.Sc

Ir. Mariati Tamba, MM

Ir. Hanna Dewi Hasanah

Ir. Mutiara Pandiangan, MM

Ir. Cut Ratna

Ir. Desni Endri

